



FLYPAPER EFFECT PADA BELANJA DAERAH KOTA KENDARI

¹Ary Sulviyani, ²Akhmad Firman, dan ³Muhamad Armawaddin

Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, 93231

Email: arysulviyani25@gmail.com

² Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, 93231

Email: akhmadfirman@gmail.com

³ Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, 93231

Email: adiox68@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the effect of PAD (original revenues) and DAU (grants) on Regional Expenditures and to find out and detect the existence of flypaper effect on Regional Expenditures in Kendari City for the period 2000-2016. The object of this study is flypaper effect. The type of data is secondary data which was analyzed using multiple linier regression analysis method with the help of SPSS 24 software. The result showed that PAD and DAU had significant influence on Regional Expenditures, and the PAD coefficient value was 2.687 greater than the DAU coefficient value is 1.182 ($2.687 > 1.182$), it can be concluded that there is no flypaper effect on the Regional Expenditures of Kendari City. That is, there is no inefficiency in the use of DAU that are greater than the PAD in financing the Regional Expenditure of Kendari City.

Keywords : Flypaper Effect, PAD, DAU, Regional Expenditures

Kode Klasifikasi JEL: H71; H72; C33

Pendahuluan

Otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 6, merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara



Kesatuan Republik Indonesia. Daerah diberi hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan termasuk keuangannya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan cerminan pemberian hak kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan keuangan daerahnya. Adapun sumber-sumber pendapatan daerah sekaligus menjadi komponen penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dalam membiayai pembangunannya. PAD dalam penerimaannya terbagi atas beberapa komponen yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pramuka (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sumber dana utama pemerintah daerah berasal dari PAD yang dipakai untuk membiayai belanja modal dan pembangunannya. Semakin banyak PAD yang didapat, maka semakin memungkinkan daerah tersebut untuk dapat memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat melalui dana perimbangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 288, dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pramuka (2010) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa permasalahan yang terjadi saat ini, pemerintah daerah terlalu menggantungkan alokasi DAU untuk membiayai belanja daerah tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah, dalam hal ini PAD. Ketika transfer DAU yang diperoleh besar, maka pemerintah daerah berusaha agar pada periode berikutnya DAU yang diperoleh tetap. Artinya pemberian DAU yang seharusnya menjadi stimulus peningkatan kemandirian daerah, justru direspon berbeda oleh daerah. Daerah tidak menjadi lebih mandiri, tetapi malah semakin bergantung pada pemerintah pusat (Asriati dan Wahidahwati, 2017).

Ketergantungan pemerintah daerah kepada dana transfer dari pemerintah pusat tersebut memicu terjadinya fenomena *flypaper effect* pada keuangan pemerintah daerah (Putra dan Dwirandra, 2015). Menurut Maimunah (2006) *flypaper effect* atau lebih dikenal dengan efek kertas layang adalah suatu kondisi



yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak dengan menggunakan dana transfer (*grants*) yang diprosikan dengan DAU daripada menggunakan kemampuan sendiri yang diprosikan dengan PAD.

Dahlby (2011) menyatakan bahwa penelitian mengenai *flypaper effect* penting untuk memahami dampak pendanaan yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah, oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mendeteksi terjadinya gejala *flypaper effect* dengan judul penelitian "*Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Kota Kendari".

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan antara lain: (1) Apakah PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kota Kendari periode 2000-2016?; dan (2) Apakah terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah di Kota Kendari periode 2000-2016?

Tinjauan Pustaka

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Sejak tumbangnya era orde baru, masalah pembagian tugas dan pembagian sumber daya ekonomi keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bergerak ke arah otonomi daerah (Simanjuntak, 2003). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 6, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan cerminan pemberian hak kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan keuangan daerahnya. Adapun sumber-sumber pendapatan daerah sekaligus menjadi komponen penyusun APBD menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

PAD merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah (Saputri, 2014). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 18, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain PAD, sumber pembiayaan belanja daerah juga berasal dari dana perimbangan, dalam hal ini DAU.



UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 47 menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal yaitu kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan tidak terkait pelayanan dasar maupun urusan pemerintahan pilihan, sedangkan kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan DBH.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 36, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Lebih lanjut pada pasal 298 menyatakan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Flypaper Effect

Kuncoro (2007) menjelaskan bahwa istilah *flypaper effect* diperkenalkan pertama kali oleh Courant, Gramlich, dan Rubinfeld pada tahun 1979 untuk mengartikulasikan pemikiran Arthur Okun (1930) yang menyatakan "*money sticks where it hits*". Sejauh ini, belum ada padanan kata "*flypaper effect*" dalam bahasa Indonesia sehingga kata ini dituliskan sebagaimana adanya tanpa diterjemahkan. Oates (1999) dalam Inayati dan Setiawan (2017) menyebutkan bahwa ketika respon belanja daerah lebih besar terhadap transfer, maka disebut *flypaper effect*.

Maimunah (2006) menyatakan bahwa *flypaper effect* disebut sebagai suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak (lebih boros) dengan menggunakan dana transfer (*grants*) yang diprosikan dengan DAU daripada menggunakan kemampuan sendiri yang diprosikan dengan PAD.

Sagbas dan Saruc (2004) menyatakan bahwa ada 2 teori yang menjadi dasar dalam penelitian tentang sumber munculnya *flypaper effect* yaitu teori *fiscal illusion* dan *bureaucratic model*. Teori *fiscal illusion* atau ilusi fiskal menerangkan



bahwa *flypaper effect* terjadi karena ketidaktahuan penduduk daerah mengenai pembiayaan dan pembelanjaan serta keputusan yang diambil sebagai akibat dari kesalahan persepsi oleh penduduk tersebut (Schwallie, 1986 dalam Sagbas dan Saruc, 2004). Pada *bureaucratic model* (model birokratik), *flypaper effect* didefinisikan sebagai hasil dari perilaku memaksimalkan anggaran oleh birokrat yang lebih mudah menghabiskan transfer daripada melakukan kenaikan pajak (Sagbas dan Saruc, 2004). Pada model ini *flypaper effect* dapat terjadi karena kekuasaan dan pengetahuan birokrat atau pemerintah daerah akan anggaran dan transfer pemerintah.

Syarat dikatakan terjadinya *flypaper effect* adalah (Maimunah, 2006) :

- a. Apabila efek (nilai koefisien) DAU terhadap belanja daerah lebih besar daripada efek (nilai koefisien) PAD dan keduanya sama-sama signifikan.
- b. PAD tidak signifikan, maka dapat disimpulkan terjadi *flypaper effect*.

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai *flypaper effect* antara lain, Pramuka (2010) melakukan penelitian berjudul "*Flypaper Effect* pada Pengeluaran Pemerintah Daerah di Jawa". Hasil penelitian menunjukkan bahwa *flypaper effect* tidak terjadi pada kabupaten/kota di Jawa, akan tetapi PAD dan DAU terbukti cenderung menyebabkan peningkatan jumlah belanja daerah di tahun berikutnya. Saputri (2014) juga melakukan penelitian dengan judul "*Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2011-2012". Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan DAU secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan secara parsial variabel DAU lebih berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah dibandingkan dengan PAD. Ini membuktikan bahwa terjadi *flypaper effect* dalam respon pemerintah daerah terhadap DAU dan PAD.

Selanjutnya, Armawaddin (2015) juga melakukan penelitian berjudul "*Analisis Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara". Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam periode 2010-2013 terdeteksi adanya *flypaper effect* pada belanja daerah kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara yang mengindikasikan bahwa terjadi inefisiensi penggunaan dana belanja daerah.

Berdasarkan konsep dan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan, maka hipotesis penelitian dapat dituliskan sebagai berikut :

H_0 : PAD dan DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah

H_{a1} : PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah

H_{a2} : DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah



H_{a3} : PAD dan DAU secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Metode Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data berupa laporan realisasi APBD Kota Kendari periode 2000-2016 yang bersumber dari situs resmi Departemen Keuangan Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (<http://djpk.depkeu.go.id>). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda (*multiple regression*) dengan bantuan program SPSS 24.

Hasil dan Pembahasan

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Tabel 1. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2533139591,000,000	2	1266569796,000,000	328,528	,000 ^b
	Residual	5397405647,000,000	14	3855289748,000,000		
Total		2587113648,000,000	16			

Berdasarkan Tabel 1 tersebut, dapat diketahui bahwa hasil pengujian statistik F ditunjukkan oleh nilai F yaitu sebesar 328,528, dan probabilitas ditunjukkan oleh nilai $Sig.$ yaitu sebesar 0,000. Probabilitas hasil uji F yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif 3 (H_{a3}) diterima, artinya variabel independen yaitu PAD dan DAU secara bersama-sama (simultan) dan signifikan mempengaruhi variabel dependen yaitu belanja daerah.

Cara lain yang dapat digunakan untuk melakukan uji F adalah dengan membandingkan nilai F hitung dan F tabel. Nilai F hitung dalam penelitian ini adalah 328,528 dan nilai F tabel (dengan derajat bebas untuk penyebut yaitu 14, derajat bebas untuk pembilang yaitu 2 dan probabilitas 0,05) adalah sebesar 3,74.



F hitung 328,528 jauh lebih besar dari F tabel 3,74 ($328,528 > 3,74$), artinya hipotesis alternatif 3 (H_{a3}) diterima.

Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Tabel 2. Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-12235,761	35567,130		-,344	,736
Pendapatan Asli Daerah	2,687	,689	,401	3,903	,002
Dana Alokasi Umum	1,182	,200	,607	5,911	,000

Hasil pengujian statistik t pada Tabel2tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah menunjukkan tingkat probabilitas sebesar 0,002, artinya probabilitas uji t untuk variabel PAD lebih kecil dari 0,05 ($0,002 < 0,05$). Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif 1 (H_{a1}) diterima, artinya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rahmawati (2010), Saputri (2014), Putra dan Dwirandra (2015), dan Astutik (2016), yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini berarti semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan maka semakin tinggi pula pengeluaran untuk alokasi belanja daerah.

Variabel independen lainnya yaitu Dana Alokasi Umum menunjukkan tingkat probabilitas sebesar 0,000, artinya probabilitas uji t untuk variabel DAU jauh lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif 2 (H_{a2}) diterima, artinya Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2010), Saputri (2014), dan Putra dan Dwiandra (2015) yang juga menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Artinya semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diperoleh dari pemerintah pusat, maka semakin meningkat pula belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.



Hasil estimasi model regresi linier berganda dapat ditulis dalam persamaan di bawah ini :

$$\text{Belanja Daerah} = -12.235,761 + 2,687\text{PAD} + 1,182\text{DAU}$$

Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- a. Koefisien regresi PAD bernilai positif 2,687, artinya jika variabel lain dalam keadaan konstan PAD meningkat sebesar Rp1.000.000,00, maka belanja daerah akan meningkat sebesar Rp2.687.000,00.
- b. Koefisien regresi DAU bernilai positif 1,182, artinya jika variabel lain dalam keadaan konstan DAU meningkat sebesar Rp1.000.000,00 maka belanja daerah akan meningkat sebesar Rp1.182.000,00.

Flypaper Effect pada Belanja Daerah Kota Kendari

Berdasarkan hasil pengujian dan berdasarkan model regresi yang telah ditulis dalam persamaan sebelumnya, dapat diketahui bahwa nilai koefisien PAD sebesar 2,687 sedangkan nilai koefisien DAU sebesar 1,182, artinya nilai koefisien PAD lebih besar dari nilai koefisien DAU ($2,687 > 1,182$). Nilai koefisien PAD dan DAU tersebut sama-sama signifikan terhadap belanja daerah Kota Kendari. Oleh karena itu, sesuai dengan syarat dikatakan terjadinya *flypaper effect* yang telah dikemukakan sebelumnya, jika koefisien PAD $>$ koefisien DAU maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah Kota Kendari. Artinya, tidak terjadi inefisiensi penggunaan Dana Alokasi Umum yang lebih besar daripada Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai belanja daerah Kota Kendari. Dengan kata lain, pemerintah daerah Kota Kendari cenderung efisien dalam membiayai belanja daerahnya menggunakan kemampuan daerah sendiri yang diprosikan dengan Pendapatan Asli Daerah, sehingga tidak selalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat dalam hal ini Dana Alokasi Umum.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Pramuka (2010) yang meneliti *flypaper effect* pada pengeluaran pemerintah di Jawa. Melalui pemeriksaan atas laporan keuangan dari semua kabupaten dan kota di Jawa, terungkap bahwa *flypaper effect* tidak ditemukan. Hasil penelitian ini tidak sejalan atau berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sagbas dan Saruc (2004) yang menemukan adanya *flypaper effect* pada transfer di Turki. Maimunah (2006) juga menemukan bahwa telah terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah Kabupaten/Kota di Sumatera. Selain itu, Armawaddin (2015) juga menyatakan bahwa terdeteksi adanya *flypaper effect* pada belanja daerah Kabupaten/Kota di



Sulawesi Tenggara yang mengindikasikan bahwa terjadi inefisiensi penggunaan dana belanja daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan, antara lain : (1) Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Kota Kendari periode 2000-2016. Artinya, jika Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh meningkat maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerah juga meningkat, dan jika Dana Alokasi Umum yang diperoleh dari pemerintah pusat meningkat maka pengeluaran belanja daerah oleh pemerintah daerah Kota Kendari juga meningkat; (2) Nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah yaitu 2,687 lebih besar dari nilai koefisien Dana Alokasi Umum yaitu 1,182 ($2,687 > 1,182$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah Kota Kendari periode 2000-2016.

Daftar Pustaka

- Armawaddin, Muhamad. 2015. Analisis *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan FE-Unhalu*, (Online), XVI: 13-19, (<http://ojs.uho.ac.id/index.php/JEP/article/view/994>), diakses 19 Oktober 2017.
- Asriati, Dona. & Wahidahwati. 2017. *Flypaper Effect* pada DAU, DAK, dan PAD terhadap Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6 (10).
- Astutik, Eni Nur Puji. 2016. *Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2008-2014*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
- Dahlby. 2011. The Marginal Cost of Public Funds and the Flypaper Effect. *International Tax and Public Finance*, (Online), 18 (3): 304-321, (<https://econpapers.repec.org/RePEc:kap:itaxpf:v:18:y:2018:i:3:p:304-321>) diakses pada 03 Oktober 2018.
- Inayati, Nur Isna. & Setiawan, Doddy. 2017. Fenomena *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Ekuitas : Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. 1(2): 220-239.



- Kuncoro, Haryo. 2007. Fenomena *Flypaper Effect* pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi X*, (Online), (<http://www.researchgate.net/profile/HaryoKuncoro/publication>), diakses 16 Maret 2018.
- Maimunah, Mutiara. 2006. *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera*. Makalah disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi 9, Padang, 23-26 Agustus 2006.
- Pramuka, Bambang Agus. 2010. *Flypaper Effect* pada Pengeluaran Pemerintah Daerah di Jawa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, (Online), 11 (1): 1-12, (<https://media.neliti.com/media/publications/80896-ID-flypaper-effect-pada-pen-geluaran-pemerin.pdf>), diakses 28 Oktober 2010.
- Putra, Ida Bagus Dwi & Dwirandra, A.A.N.B. 2015. Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. (Online), 13 (3): 811-827, (<http://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/download/13002/11237>), diakses 14 Januari 2018.
- Rahmawati, Nur Indah 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah*. Skripsi. Semarang : Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Sagbas, Isa. & Saruc, Naci Tolga. 2004. *Intergovernmental Transfer and The Flypaper Effect In Turkey*.
- Saputri, Marissa Ayu. 2014. *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2011-2012*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Simanjuntak, Robert A. 2003. *Kebijakan Pungutan Daerah di Era Otonomi*. Makalah ini disajikan pada Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, (Online), (<http://www.lpem.org/kebijakan-pungutan-daerah-di-era-otonom/?lang=id>) diakses 19 Maret 2018.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (Online), (http://gtk.kemendikbud.go.id/files/produk_hukum/uu_23_tahun_2014.pdf), diakses 28 Desember 2017.



Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (Online), (<http://djpk.kemenkeu.go.id/?p=365>) diakses 07 November 2017.